



Resistensi Politik dalam Komunikasi Publik Pasca Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Sumardi¹, Imam Mukti², Andi Mappanganro³

¹Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia

²Ilmu Komunikasi Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia

³Pemerintah Kota Makassar, Indonesia

E-mail: mardierni69@gmail.com, imammukti@gmail.com, andimappanganrocho@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-11-22 Revised: 2022-12-20 Published: 2023-01-04 Keywords: <i>Resistance;</i> <i>Agenda Setting;</i> <i>Policy.</i>	Political resistance in the context of public communication in Tamalate District is about dissatisfaction, which was shown by two camps, namely the winners and losers after the 2020 Makassar City elections were completed. Efforts to provoke mental provocation by the winning side against the losing side were exhaled through messages from social media groups and conversations in society. Resistance was formed as a process of setting the agenda of political actors to make public issues the focus of the program of the elected regional head government in issuing public policies which then tended to weaken the position of camps that were considered not in synergy with the pattern of the elected Mayor of Makassar. The research approach with qualitative descriptive method aims to gain perspective through observation and interviews from several sources. The results of the study show that the consequences of different political choices are an excuse for the support team as political agents that triggers resistance so that public communication that should make Makassar City government programs less effective in implementing them to the community. In the context of political interests, the mass media is not fully a free agent in society. The role of the media as a reinforcement of post-contestation information by providing news on government policy discourse.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2022-11-22 Direvisi: 2022-12-20 Dipublikasi: 2023-01-04 Kata kunci: <i>Resistensi;</i> <i>Agenda Setting;</i> <i>Kebijakan.</i>	Abstrak Resistensi politik dalam konteks komunikasi publik di Kecamatan Tamalate adalah tentang ketidakpuasan, yang diperlihatkan oleh dua kubu yaitu kubu pemenang dan kubu yang kalah setelah pilkada Kota Makassar Tahun 2020 selesai. Upaya provokasi mental yang dilakukan oleh kubu pemenang terhadap kubu yang kalah gencar dihembuskan melalui pesan dari grup media sosial dan perbincangan di masyarakat. Resistensi terbentuk sebagai proses agenda setting aktor politik untuk menjadikan masalah publik sebagai fokus program pemerintahan kepala daerah terpilih dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang kemudian cenderung melemahkan posisi kubu yang dianggap tidak bersinergi dengan pola Walikota Makassar terpilih. Pendekatan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan perspektif melalui observasi dan wawancara dari beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsekuensi beda pilihan politik menjadi alasan bagi tim pendukung sebagai agen politik yang memicu resistensi sehingga komunikasi publik yang seharusnya menjadikan program pemerintah Kota Makassar menjadi kurang efektif dalam penerapan kepada masyarakat. Dalam konteks kepentingan politik, media massa tidak sepenuhnya menjadi agen bebas dalam masyarakat. Peran media sebagai penguat informasi pasca kontestasi dengan memberikan berita wacana kebijakan pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan kepala daerah sebagai proses pembagian wewenang dan kekuasaan negara, sangat dibutuhkan untuk dapat menjadi wakil pemerintah pusat dan wujud nyata sebuah proses implementasi pembagian kekuasaan dalam sistem otonomi daerah. Dalam UU otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 24 ayat 5 menetapkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya untuk meningkatkan efesensi anggaran pusat serta tindak lanjut realisasi prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas kebebasan persamaan hak dalam politik, maka Pemilihan umum kepala daerah secara langsung tidak hanya dilakukan lima tahun sekali tapi juga dilakukan secara serentak.

UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 3 yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang yang menetapkan bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan kepastian hukum kekuasaan di daerah yang mutlak bagi politikus lokal, bukan lagi sentral kekuasaan pemerintah pusat yaitu sebagaimana pada masa orde baru. Namun setelahnya, orientasi politik di daerah cenderung menimbulkan fenomena sosial politik ketika konsekuensi perbedaan dukungan mengurangi sinergi dalam komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Fenomena dalam resistensi ini, terlihat setelah penentuan hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang dikhususkan pada pemilihan Wali kota/Wakil Wali kota Makassar pada 9 Desember 2020, dimana kemenangan pasangan Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi dengan perolehan 25.617 suara sah mengungguli calon lain. Disharmoni komunikasi tersebut sebenarnya mulai nampak saat demosi dan *resetting* pada pemerintahan, yang mempengaruhi lancarnya komunikasi publik untuk pelaksanaan program kerja yang merupakan kebijakan dalam pemerintah Kota Makassar.

Gejala resistensi yang muncul ketika sebuah kebijakan diambil oleh seorang kepala daerah, dinilai hanya sebagai konsekuensi perbedaan dukungan dari masyarakat atau birokrat saat pemilihan kepala daerah Kota Makassar Tahun 2020 lalu. Meski perbedaan dukungan politik dalam masyarakat adalah hal yang wajar dalam konteks sosial politik, namun gejala resistensi yang berlanjut setelah kontestasi selesai tentu berpotensi mengurangi konsentrasi pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program kerja serta pemulihan dalam sosial ekonomi sebagai efek dari terpaan pandemi COVID-19. Fenomena resistensi tersebut juga nampak dalam tubuh birokrasi pemerintahan. Dengan kepentingan maupun secara terpaksa dengan dalih loyalitas, mereka justru dijadikan sebagai agen dari partai politik pendukung kontestan Pilkada Kota Makassar ditengah masyarakat. Komunikasi politik yang dibangun oleh para aktor politik lokal bersama para pejabat publik, ikut memberikan peluang besar keterlibatan secara terselubung para aparatur negara atas dasar loyalitas. Tujuannya, agar aktor politik tersebut bisa diberikan peluang untuk merebut

simpati tokoh masyarakat seperti ketua RW/RT, tokoh pemuda atau ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Menurut Viera R. Adia et.al, (2022: 47) Ketidaknetralan pegawai ASN dalam politik dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan/ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

Idealnya yaitu komunikasi politik dalam pemerintahan, seharusnya mampu membangun pola komunikasi konstruktif dalam menjalin sebuah sinergi komunikasi publik dan mensosialisasikan program kerja demi mewujudkan sistem pemerintahan yang baik pula ke depannya. Namun disisi lain tentu akan membentuk pola komunikasi destruktif dalam komunikasi publik, jika konsekuensi dari perbedaan pilihan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang hanya menimbulkan kerancuan dan kegaduhan di masyarakat. Media massa menangkap gejala sosial tersebut dengan memuat berita, yang kemudian membuat opini publik mengarah ke disharmoni komunikasi. Opini masyarakat kemudian dengan sendirinya terbentuk, bahwa kebijakan atau pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar lebih menjurus kepada konsekuensi beda pilihan saat pemilihan kepala daerah Kota Makassar Tahun 2020. Suhu politik setelah Pilkada Kota Makassar cenderung masih hangat di grup media sosial, yang melibatkan pendukung kepala daerah Kota Makassar terpilih. Pesan berisi tekanan terhadap ketua RT/RW yang disinyalir tidak mendukung, atau wacana kebijakan yang bernuansa konsekuensi beda pilihan tersebar di grup media sosial. Hal ini yang membawa dampak bagi pemerintahan di Kecamatan Tamalate secara perlahan. Munculnya komunikasi tidak harmonis dan ketidaknyamanan yang di alami warga dalam pelayanan publik, akan membuat kebingungan warga terlebih adanya perubahan struktur pemerintahan di tingkat rukun warga yang dapat mempengaruhi komunikasi publik di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, serta sistem penelitian dengan cara memakai pendekatan konsep, teori dan hipotesa untuk mendapatkan pembuktian tentang masalah yang akan diteliti. Secara garis besar, proses penelitian pada umumnya melalui langkah dengan menemukan inti permasalahan, menelaah buku-buku, merumuskan tujuan dan hipotesis, menyusun instrument pengumpulan

data, melakukan penelitian, pengolahan data kemudian menarik kesimpulan dalam penyusunan laporan. (Suharsimi, A 2007). Untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena resistensi politik setelah Pilkada serentak 2020 khususnya di Kecamatan Tamalate dari beberapa perspektif partisipan berupa observasi dan wawancara, maka perlu dilakukan pendekatan penelitian dengan metode Deskripsi Kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe & explore*) dan menggambarkan serta menjelaskan (*to describe & explain*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi politik sering muncul tengah masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah maupun pada hasil pemilihan kepala daerah. Hal tersebut karena adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh pasangan calon maupun pendukung pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan. Selain itu, adanya kebijakan yang dilakukan kepala daerah terpilih yang terkesan menyudutkan para pendukung lawan politiknya, seperti penggantian ketua RT, RW, lurah maupun camat yang terindikasi tidak mendukung kepala daerah pada proses pemilihan berlangsung. Untuk memahami situasi dan bagaimana gambaran lokasi pada penelitian secara sistematis, maka perlu penulis menjabarkan apa yang menjadi bahan yang kemudian menjadi hasil penelitian di Kecamatan Tamalate.

1. Resistensi Pasca Pilkada Kota Makassar

Cukup banyak penelitian terkait fenomena resistensi dalam pilkada di berbagai daerah yang di kaji dan diteliti sebelumnya yang merupakan dasar perbandingan serta dijadikan tambahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Untuk memahami gejala resistensi yang merupakan persoalan yang penulis angkat pada skripsi ini, maka perlu pembahasan yang akan menjawab fenomena sebagai bahan penelitian penulis di Kec. Tamalate. Setelah Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 selesai dan walikota terpilih telah dilantik, maka kemudian hal yang muncul kemudian adalah efek konsekuensi yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh wali kota terpilih. Terlepas dari hak Wali kota terpilih untuk mengeluarkan kebijakan setelah pilkada Kota Makassar tahun 2020, ada peran dari tim pendukung yang berada di wilayah Kecamatan Tamalate sebagai motor penggerak untuk mendesak kebijakan tersebut dikeluarkan. Penulis akan menemukan

jawaban tentang bagaimana resistensi politik tersebut berpengaruh pada buruknya komunikasi publik di Kecamatan Tamalate.

Peran tersebut bersifat provokasi secara mental ketika para tim sukses bertindak dan bersikap sebagai penentu dan memperlihatkan *power* sebagai pemenang dan makin terlihat aktif setelah pilkada selesai. Hal ini membuat kubu yang disinyalir tidak berada di pihak mereka kemudian tersisihkan dengan sendirinya. Apalagi, setelah wacana kebijakan bernuansa konsekuensi beda pilihan tersebut berhembus yang semakin membuat kubu tersebut tidak mempunyai konsentrasi lagi terhadap pelayanan bahkan kurang responsif serta koordinasi. Hal pertama yang merupakan pembahasan adalah bagaimana resistensi tersebut tetap terjadi setelah Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 selesai. Tentu tidak terlepas dari peran aktor politik yang merupakan pendukung calon wali kota terpilih yang kemudian mereduksi situasi yang merupakan pelampiasan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak loyal. Masalah kinerja lurah dan camat dalam menuntaskan program Makassar *Recovery* sebagai lanjutan pengendalian Covid-19 dianggap kurang maksimal bahkan dicap kurang responsif. Hal utama ini yang sudah dipastikan merupakan sebuah peluang bagi aktor politik yang memenangkan pilkada Kota Makassar untuk menyingkirkan orang yang dianggap bukan loyalis mereka.

Berbagai laporan masyarakat terkait pada kinerja lurah atau camat yang kurang tanggap dalam menghadapi masalah yang ada di wilayah kemudian di agendakan oleh tim sukses, dengan cara mendesak agar Wali kota terpilih segera mengeluarkan kebijakan demosi dan mutasi pejabat. Dan tentu saja hal ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu enam bulan setelah dilantik, kepala daerah terpilih bisa melakukan mutasi jabatan ASN. Gerbong mutasi tersebut kemudian bergulir secara bertahap dimulai dari mutasi camat dan lurah, dan selanjutnya bergerak ke jabatan eselon III dan IV. Langkah ini memang adalah kebijakan di dalam pemerintahan, apalagi dalam pemerintahan yang baru saja berjalan. Wacana pergeseran pejabat yang mempunyai jabatan ke non *job* ini yang kemudian menimbulkan gejolak perlawanan secara tertutup berupa kurangnya keseriusan para lurah dan kepala seksi yang diganti untuk memberikan data dan laporan

kegiatan setelah tidak lagi menjabat. Hal ini disebabkan karena begitu gencarnya para tim pendukung yang memberikan pesan baik di media sosial maupun dari informasi yang tersebar kepada masyarakat. (Mukti et al., 2021). Tindakan memprovokasi mental baik lewat media sosial maupun secara langsung untuk sekedar memberikan ancaman atau peringatan bahwa mutasi akan segera dilakukan oleh Wali kota terpilih.

Disisi lain, kubu resisten yang tersisihkan kemudian bersikap kurang reaktif bekerja dan tidak bersemangat ketika kemudian wacana mutasi itu bergulir. Para agen politik yang merupakan tim pendukung pemenang memperlihatkan eksistensi mereka secara langsung di mana dengan sengaja memprovokasi baik dengan sikap maupun komunikasi yang kemudian menimbulkan opini masyarakat. (Widarwati, 2020). Persoalan camat dan lurah yang dinilai lambat dalam mengambil tindakan ditambah tiidak kompaknya dalam internal dan eksternal dalam penanganan Covid-19 membuat Wali kota Makassar mengambil kebijakan tersebut. Hal ini sudah tentu membuat peluang aktor politik untuk mengagendakan suatu wacana mutasi yang sebenarnya berisi konsekuensi atas perbedaan sikap politik setelah pilkada Tahun 2020 kemarin. Hal ini sejalan dengan teori yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu adanya agenda yang diatur sedemikian rupa untuk menanggapi masalah publik, dengan pengambilan kebijakan yang namun penuh nuansa konsekuensi setelah pilkada serentak. Sorotan penulis disini adalah adanya peran sentral aktor politik dalam penentuan agenda melalui media yang merupakan magnet sehingga wali kota mengeluarkan kebijakan. Peran media dalam agenda *setting* tersebut hanya sebatas menguatkan proses yang sedang di agendakan.

Persoalan persampahan Kota Makassar selalu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Makassar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam program kerja bakti serta masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor jasa retribusi sampah tentu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Makassar. Yang paling dianggap bertanggung jawab selain lurah serta camat tentu adalah tokoh masyarakat di wilayahnya. Ini kemudian dijadikan momentum tepat bagi aktor politik untuk menyaring tokoh masyarakat yang

disinyalir kurang mendukung bahkan tidak mendukung calon yang terpilih saat pilkada Kota Makassar Tahun 2020. Hal ini pula pada agenda setting aktor politik, ketika ketua RT/RW yang tidak mendukung dianggap tidak maksimal dalam pelayanan retribusi sampah warga dan dianggap tidak peduli lagi dengan penyetoran retribusi sampah. Padahal, info yang penulis dapatkan di lapangan berbeda, ketua RT/RW yang tersisihkan dianggap mampu merangkul semua warga dan mempunyai kinerja yang baik utamanya dalam pelaksanaan kerja bakti warga serta penyetoran retribusi persampahan. Rendahnya partisipasi vaksinasi covid 19 juga turut menjadikan alasan penggantian ini. Para ketua RT/RW yang diganti dianggap tidak serius dalam mensosialisasikan program vaksinasi kepada warganya. Pemerintah Kota Makassar kemudian mempunyai alasan membuat kebijakan penunjukan ketua RT/RW sebagai pejabat baru semakin mudah.

Akibatnya, ada resistensi meski bukan dalam bentuk perlawanan yang menjurus ke arah konflik, tetapi kemunculan opini negatif baik dari ketua RT/RW yang tersisih maupun dari warga masyarakat yang terkendala dalam pelayanan akibat ketidaktahuan akan penjabat baru menggantikan yang lama. Akibatnya kemudian, keluhan warga akibat keterlambatan pelayanan serta kurang pahamnya pejabat ketua RT/RW baru dalam memahami proses administrasi ke masyarakat. Proses agenda setting membentuk opini masyarakat di wilayah Kecamatan Tamalate di motori oleh aktor politik yang selain bertolak belakang dalam pilihan politik, juga mempunyai kepentingan sendiri yang menguntungkan posisi mereka sebagai tim pendukung Wali kota terpilih. (Ritonga, 2018). Dalam proses agenda setting tersebut, Wali kota Makassar tentu membutuhkan masukan dari semua tim pendukung yang berada di wilayah RT mereka, ini kemudian membuat informasi yang didapatkan tidak berimbang dan juga terkesan asal penunjukan tanpa melihat kemampuan tokoh yang ditunjuk sebagai pengganti ketua RT/RW tersebut. Hasil penelitian penulis menunjukkan adanya kesan ketergantungan wali kota terpilih pada aktor politik sebagai pendukung atau loyalis nya. Hal ini kemudian menyebabkan tingkat resistensi atau penolakan terhadap segala kebijakan pemerintah Kota Makassar khususnya dalam wilayah kecamatan bisa dikatakan

sangat tinggi. (Moon & Holling, 2015). Segala hal yang disampaikan oleh tim pendukung yang ada di wilayah Kecamatan Tamalate menjadikan tolak ukur bagi wali kota Makassar dalam menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan.

Adanya sikap saling bertentangan antara pihak yang berbeda pilihan politik saat Pilkada Kota Makassar tahun 2020 menimbulkan ketidakharmonisan dalam komunikasi, serta memperburuk komunikasi publik setelah Pilkada selesai, yang seharusnya merupakan semangat baru sinergi pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Tamalate. Hal ini di tandai dengan kurang tanggapnya pihak yang berbeda sikap politik dalam menyuskeskan program utama pemerintah Kota Makassar. Dampaknya terlihat pada realisasi retribusi sampah di mana target tahun ini masih jauh dari harapan, atau kurang gencarnya aparat kelurahan berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat di wilayahnya dalam program penarikan retribusi persampahan secara maksimal. Kenapa bisa demikian? hipotesis penulis merujuk pada kemungkinan lemahnya komunikasi publik yang dilakukan oleh kepala SKPD dalam merangkul semua kubu yang bertolak belakang dan berbeda sikap politik saat pilkada Kota Makassar kemarin. Peran media dalam konteks institusi sosial yang diharapkan mampu mengangkat fenomena ini tidak terlihat secara langsung. Peran media terbatas pada pemberitaan efek dari kebijakan tersebut pada masyarakat. Dalam artian media hanya terbatas sebagai penguat agenda ini secara pasif. (Hasibuan, 2018).

Saat kebijakan penggantian ketua RT/RW dengan pejabat baru, media massa memberitakan konflik yang terjadi pada sikap perlawanan mantan ketua RT/RW yang digantikan. Namun tidak mengupas lebih jauh kondisi di masyarakat terkait kebijakan tersebut. Hal ini mungkin didasari oleh sensitifitas dari kebijakan yang bernuansa konsekuensi politis, yang bukan ranah bagi media untuk memberitakan fenomena resistensi ini lebih mendalam (Cheung, 2021). Kecenderungan peran tim sukses dalam proses agenda setting setelah Pilkada Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate, menjadikan kondisi pemerintahan lebih terlihat kurang harmonis antara masyarakat. Terlihat ada jarak yang memisahkan di masyarakat. Jarak tersebut terlihat dari

kegiatan yang tidak melibatkan warga yang disinyalir menjadi bagian dari lawan politik, ataupun tidak adanya keterlibatan mantan ketua RT/RW dalam setiap kegiatan yang merupakan program bagi pemerintah Kota Makassar di wilayah Kecamatan Tamalate. Pengurangan tenaga honorer di Kecamatan Tamalate juga cenderung melihat faktor konsekuensi. Ini dilihat dari pernyataan narasumber yang merupakan Tenaga Honorer di Kecamatan Tamalate yang merasa dikorbankan karena loyalitas terhadap atasan sebelumnya. Dalam artian, mereka berpendapat bahwa tes Laskar pelangi untuk uji kompetensi Tenaga Honorer hanya dalih untuk menyingkirkan mereka yang dianggap bukan pendukung wali kota terpilih saat pilkada Kota Makassar.

Meski dalam proses pengurangan ini melalui tahapan seleksi kompetensi yang kemudian dikenal dengan seleksi laskar pelangi, namun tetap saja dalam penentuannya sudah diatur sedemikian rupa agar para tenaga honorer yang disinyalir tidak loyal secara politik akan mendapatkan konsekuensi masing-masing. Ironisnya, sejumlah pegawai non ASN yang tidak diperpanjang masa kontraknya justru merupakan tenaga administrasi yang sudah puluhan tahun bekerja dan memiliki kompetensi penguasaan pekerjaan atau tugas mereka. Posisi mereka kemudian digantikan oleh tenaga honorer yang baru dan disinyalir adalah rekomendasi oleh tim sukses wali kota terpilih. Yang kemudian terlihat adalah terganggunya sistem pelayanan publik hingga proses input data di tingkat kelurahan. Di mana saat ini semua data yang dilaporkan melalui sistem dan aplikasi, dan beberapa dari tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus tersebut adalah operator penginput data masyarakat di kelurahan masing-masing. Kinerja pelayanan menjadi terkesan lambat, karena para tenaga honorer yang di rekomendasikan dan lulus menggantikan tenaga honorer yang lama, belum tentu menguasai dan beradaptasi dengan sistem dan masyarakat, sehingga membutuhkan pelatihan dan tentu adaptasi ke lingkungan yang menjadi wilayah kerja mereka di kelurahan. Proses agenda setting yang terjadi dalam kebijakan pengurangan tenaga honorer kemudian membuat program kerja di kelurahan dan di kecamatan lambat. Sistem pelaporan dan pendataan kemudian menjadi terkendala yang juga mempengaruhi jalannya program yang

menggunakan anggaran dana kelurahan dan membuat sulitnya koordinasi pencapaian pendataan di Kecamatan Tamalate secara keseluruhan.

Dalam hal jumlah Tenaga Honorer yang dianggap berlebih, perlu dibuatkan sistem yang efektif oleh kepegawaian di mana diperlukan tes kompetensi dan pendataan jumlah kebutuhan tenaga honorer yang diperlukan setiap SKPD. Hal ini bertujuan agar didapatkan data yang konkret dan jelas terkait kebutuhan dan keahlian yang memang diperlukan dalam setiap urusan perkantoran. Dampak pengurangan honorer yang melihat konsekuensi perbedaan pilihan politik juga membuat asumsi khalayak bahwa ada sistem yang salah dalam kebijakan yang dikeluarkan. Ketidakjelasan nasib tenaga honorer yang sudah lama bekerja lalu diberhentikan dengan alasan yang juga tidak jelas akan membuat masalah baru yaitu akan meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Makassar. Diperlukan sebuah konsep pendekatan kearifan lokal yang bisa memberikan harmoni bagi pemerintah Kecamatan Tamalate bersama semua tokoh masyarakat di mana dua hal tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Makassar untuk membuat semua pihak yang saling mendukung dalam satu persepsi terhadap program sosial kemasyarakatan dan bisa berjalan sesuai dengan tujuan sehingga publik bisa langsung merasakan manfaatnya. Untuk meredam resistensi pasca pilkada serentak maka diperlukan sebuah kompetensi kepemimpinan yang mendukung efektivitas komunikasi publik meliputi:

- a) Memiliki kompetensi dasar yang merepresentasikan kemampuan merekatkan nilai-nilai beda kultural dalam organisasi atau wilayah tertentu dan menjadi simbol perekat dari masyarakat majemuk dan plural.
- b) Memiliki kompetensi merajut solidaritas dalam keberagaman yang membangun kesejahteraan masyarakat.
- c) Memiliki kompetensi menyampaikan pesan-pesan yang memotivasi masyarakat dengan penuh etika, bermartabat dan tidak memasuki hal yang bukan wilayah tugas pokok dan fungsinya.

2. Pola Komunikasi yang Efektif Melalui Media Dalam Meredam Resistensi Politik.

Dalam setiap Pemilu, tentu akan ada dua hal yang terjadi yaitu ada yang menang dan kalah. Hal yang menjadikan kondisi berbeda ketika setelah pilkada selesai di mana pemenang telah dilantik dan menjalankan pemerintahan, masih saja ada timbul pihak yang saling berlawanan dengan lainnya sehingga mengganggu efektifnya kinerja program dalam konteks komunikasi publik. (Rosidi, 2017). Diperlukan sebuah pendekatan yang mampu memberikan kepastian dan menghadirkan keadilan bagi semua pihak, meskipun tetap ada konsekuensi yang mengikuti kebijakan yang dikeluarkan. (Suryandari et al., 2013). Pendekatan melalui komunikasi publik dengan menggunakan media sosial sebagai agenda *setting* untuk mempengaruhi opini masyarakat di Kecamatan Tamalate agar mendukung dan menyukseskan program pemerintahan di Kota Makassar. Pihak pemerintah Kecamatan Tamalate mengakui bahwa setelah pilkada ada kesulitan yang didapatkan dalam menyinergikan program kerja pemerintah Kota Makassar dalam sosialisasi ke masyarakat. Namun pihaknya terus melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program vaksinasi Covid 19, menggalakkan kerja bakti setiap hari sabtu secara bergiliran dengan melibatkan semua staf kecamatan dan tokoh masyarakat.

Salah satunya dengan menggunakan sarana media sosial untuk memberikan himbauan dan terus menyosialisasikan program kerja pemerintah Kota Makassar. Media sosial setiap pegawai dihimbau agar bisa membantu menyebarkan informasi kegiatan di akun media sosial masing-masing. Tidak ketinggalan pula, tokoh masyarakat juga diharapkan mampu merangkul semua warga dengan mengaktifkan akun media sosial dan mengirim foto kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya. (Ashaf, 2006). Hal ini bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi kemasyarakatan yang sempat renggang sebagai efek dari perbedaan pilihan politik saat Pilkada Kota Makassar kemarin. Tentu hal ini sangat berguna untuk menyinergikan program dan kebijakan pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat, sesuai slogannya yaitu Makassar *Recover*. Fenomena resistensi politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya setelah pilkada. Diperlukan sikap empati dan

saling mendukung serta kerja sama untuk kebaikan pelayanan publik di Kecamatan Tamalate. Komunikasi yang tidak efektif akan berpengaruh dalam tumbuhnya kubu atau kelompok yang saling meresistensi baik dalam organisasi dan masyarakat di wilayah Kec. Tamalate. Hal ini pasti mempengaruhi pelayanan publik khususnya ketika konsekuensi beda pilihan menjadi dasar dalam melayani masyarakat. (Adat Sudrajat, 2014).

Oleh sebab itu, pemerintah Kecamatan Tamalate bertindak proaktif dan dalam posisi netral dalam mengantisipasi segala hal yang berbau politis dalam konteks pelayanan publik. Menemukan pola komunikasi yang efektif berlandaskan kearifan untuk merangkul semua kubu yang sempat renggang dengan mendekatkan kembali semua pihak dalam satu forum kebersamaan. Dengan adanya pola pendekatan media sosial dalam sosialisasi ini, komunikasi publik dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak, dan tidak terlihat ketimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah Kota Makassar. (Berliani Ardha, 2014). Apapun itu, setiap kontestasi seperti pemilihan kepala daerah tentu akan mengandung konsekuensi yang harus diterima semua pihak, pasca pelantikan dan wali kota terpilih sudah menjalankan pemerintahan. Dalam artian setelah pilkada selesai, semua pihak yang terlibat dalam perbedaan pilihan politik sudah harus saling bekerja bersama membangun Kota Makassar. Dalam prosesnya, teori agenda *setting* di Kecamatan Tamalate dibentuk oleh tim pemenangan walikota terpilih dengan mengarahkan sebuah opini bahwa konsekuensi beda sikap politik akan mempengaruhi mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar. Media kemudian menguatkan opini publik dengan berita yang dimuat tentang kebijakan tersebut. (Muthahhari, 2020).

Mediapun menurut pemahaman penulis kurang memberikan informasi yang terperinci terkait efek yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota Makassar. Nuansa konsekuensi beda sikap politik yang mengiringi kebijakan mutasi ASN, penggantian ketua RT/RW, serta pengurangan tenaga honorer. Situasi ini menimbulkan sikap penolakan masyarakat atas kebijakan berupa resistensi sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses kebijakan pemerintahan yang berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah Kec.

Tamalate terus mengajak semua masyarakat melalui komunikasi publik yang mengedepankan falsafah "*sipakatau, sipakainge, sipakalebbi*" yang sarat dengan kearifan lokal. Merangkul kembali dan berinteraksi dengan warga melalui media sosial sambil mensosialisasikan program andalan pemerintah kota Makassar adalah salah satu upaya pemerintah kecamatan dengan harapan untuk memperoleh dukungan penuh warga, sehingga efektivitas kinerja dan tujuan program tepat sasaran di samping pendekatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Tamalate.

Peran media sosial dalam mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu cara pemerintah menjalin komunikasi publik kepada masyarakat. (Saleh & Pitriani, 2018). Hal ini bertujuan mendapatkan kepedulian dan dukungan masyarakat terkait program pemerintah Kota Makassar selain mencairkan disharmoni komunikasi yang masih terjadi di masyarakat setelah berbeda sikap politik saat pilkada Kota Makassar tahun 2020. Media sosial menjadi forum koordinasi dan diskusi antara pemerintah dan masyarakat serta mempermudah sinergi semua pihak, dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Tamalate. Sehingga yang akan didapatkan adalah sebuah kesatuan yang mendorong suksesnya semua program. (Hertley, 2010).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Resistensi politik menjadi dinamika yang bersifat sinergis atau konsensus ketika pihak yang terlibat saling menguatkan dan memberdayakan. Memakai pola komunikasi yang tepat, maka program dijalankan untuk merangkul dan menjalin kerja sama semua pihak baik yang sejalan maupun tidak sejalan sebelum pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Makassar. Pada sisi lain, akan menjadi dinamika yang bersifat konfliktual jika salah satu pihak berlawanan atau membatasi ruang gerak pihak yang lain. Fenomena resistensi yang merupakan produk dari proses interaksi aktor dan media dalam agenda *setting* yang kompleks dan tentunya melibatkan banyak pihak yang sama dalam satu komunitas dan kelompok dengan tujuan yang sama.

B. Saran

Pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Tamalate hendaknya terus merekonsiliasi komunikasi dengan tangan terbuka dalam satu persepsi untuk saling bekerja bersama menyukseskan semua program pemerintah Kota Makassar. Memberikan peran semua pihak dengan mengaktifkan kegiatan kemasyarakatan agar semua masalah publik yang ada akan dengan mudah dilaksanakan dengan menggaling dukungan penuh dari segenap lapisan masyarakat. Sebagai saran, penulis mengingatkan tentang pentingnya dua hal dalam setiap kontestasi pilkada yaitu; Netralitas dalam politik adalah hal yang mutlak dan wajib di patuhi bagi setiap ASN agar tidak terjadi gejala yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adat Sudrajat. (2014). Jurgen Habermas: teori kritis dengan paradigma komunikasi. *Journal Article*, 1-7.
- Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8, 205-218.
- Berliani Ardha. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 105-120.
- Cheung, J. (2021). Real Estate Politik: Democracy and the Financialization of Social Networks. *Journal of Social Computing*, 2(4), 323-336. <https://doi.org/10.23919/JSC.2021.0030>
- Hasibuan, H. I. (2018). Pemberitaan Media Cetak dalam Mempengaruhi Partai Politik untuk Menentukan Calon pada Pemilu Tahun 2015. *Persepsi: Communication Journal*, 1(1), 81-96. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v1i1.2509>
- Hertley, J. (2010). *Communication, cultural and media studies: konsep kunci*. Jalasutra.
- Moon, D. G., & Holling, M. A. (2015). A Politic of Disruption: Race(ing) Intercultural Communication. *Journal of International and Intercultural Communication*, 8(1), 1-6. <https://doi.org/10.1080/17513057.2015.991073>
- Mukti, I., Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Efek Pemberitaan Kekerasan Di Media Sosial Terhadap Citra Negatif Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 2598-9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2576/http>
- Muthahhari, M. R. (2020). Jaringan Komunikasi Politik yang Dipilih Kepala Daerah dalam Proses Perumusan RAPBD Kota Banjarbaru Tahun 2019. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 2-3. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3948>
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rosidi, R. (2017). Strategi Komunikasi politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), 78-100. <https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>
- Saleh, G., & Pitriani, R. (2018). Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together." *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 103. <https://doi.org/10.24912/jk.v10i2.2673>
- Suryandari, N., Rahmawati, F. N., & Kurniasari, N. D. (2013). Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Politik Masyarakat Sampang (Madura) Berbasis Information And Social Approach (Strategi Komunikasi Politik dalam Meminimalisasi Absentia Voters di Pamator). *Pamator*, 6(1), 95-102.
- Widarwati, D. (2020). Strategi Komunikasi Politik M. Miftah Dalam Pemenangan Pemilu 2019 Di Salatiga. *Jurnal An-Nida*, 12(2). <https://www.pkb>.